

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan media dalam menciptakan dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Begitu pentingnya investasi sumber daya manusia melalui pendidikan sehingga berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat secara umum, keluarga, dan individu anggota masyarakat merasa berkepentingan untuk melakukan investasi pendidikan. Dalam hal ini Ace Suryadi dalam bukunya yang berjudul: *Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan*, mengemukakan bahwa “pemerintah berupaya meningkatkan mutu pendidikan agar di kemudian hari akan diperoleh SDM yang semakin menguasai keahlian dan keterampilan, dapat bekerja secara profesional, serta dapat menghasilkan karya-karya yang bermutu sehingga SDM tersebut dapat memberikan peranan dalam pembangunan bangsa” (1999: 189). Dengan demikian yang dituju oleh investasi sumber daya manusia adalah penciptaan manusia yang berkualitas. Manusia yang berkualitas adalah manusia yang memiliki pengetahuan, terampil, berdisiplin, dan mempunyai daya yang tinggi untuk membangun di segala bidang, sedangkan pendidikan merupakan salah satu lembaga yang mengemban kunci dalam pengadaan sumber daya manusia yang berkualitas. Di dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989 disebutkan bahwa:

pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (1999: 4).

Berbicara masalah sumber daya manusia, dalam hal ini Notoatmodjo (1998: 1) melihatnya dari dua aspek, yakni kuantitas dan kualitas. *Kuantitas* menyangkut jumlah sumber daya manusia (penduduk) yang kurang penting kontribusinya dalam pembangunan, dibandingkan dengan aspek kualitas. Bahkan kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas yang baik akan menjadi beban pembangunan suatu bangsa. Sedangkan *kualitas* menyangkut mutu sumber daya manusia tersebut, yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik maupun kemampuan non-fisik (kecerdasan dan mental). Oleh sebab itu untuk kepentingan akselerasi suatu pembangunan di bidang apapun, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu persyaratan utama. Selaras dengan yang dikemukakan oleh Notoatmodjo, Nanang Fattah (2000: 16) mengemukakan pula bahwa sumber daya manusia terdiri dari dimensi kuantitatif dan kualitatif. Tenaga kerja, prestasi tenaga kerja yang memasuki dunia kerja dalam jumlah waktu belajar adalah dimensi *kuantitatif* dari SDM. Sedangkan dimensi *kualitatif* mencakup berbagai potensi yang terkandung pada setiap manusia, antara lain pikiran (*ide*), pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang memberikan pengaruh terhadap kapasitas kemampuan manusia untuk melaksanakan pekerjaan yang produktif. Jika pengeluaran untuk meningkatkan kapasitas tersebut ditingkatkan, maka nilai produktivitas dari SDM akan menghasilkan nilai baik (*rate of return*) yang positif.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu amanat pada GBHN 1993, terutama yang paling tegas adalah pada GBHN 1993, bahkan menjadi titik berat pembangunan pada pembangunan jangka panjang kedua (PJP II) seiring dengan pembangunan ekonomi. Selaras dengan hal ini Sukanto (1988: 33) mengemukakan bahwa "pendidikan kejuruan memfokuskan usahanya pada penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan

sumberdaya manusia.” Namun Sukanto mengingatkan bahwa pendidikan kejuruan tidak seharusnya mendidik peserta didik dengan seperangkat skill yang spesifik untuk pekerjaan tertentu saja, karena hal ini biasanya lalu kurang memperhatikan perkembangan sebagai suatu totalitas. Menekankan pengembangan kemampuan spesifik secara terpisah dari totalitas pribadi peserta didik akan berarti memberi bekal yang sangat terbatas bagi masa depannya sebagai tenaga kerja.

Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK), sebagai salah satu sub-sistem dari sistem pendidikan nasional, sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, yang mempunyai tujuan utama menyiapkan tamatannya memasuki dunia kerja, adalah salah satu jenis dan jenjang pendidikan yang mendapatkan perhatian utama sesuai dengan amanat GBHN termaksud.

Pendidikan kejuruan dapat diklasifikasikan ke dalam jenis pendidikan khusus (*specialized education*), karena kelompok pelajaran atau program yang disediakan hanya dipilih oleh orang-orang yang memiliki minat khusus untuk mempersiapkan dirinya bagi lapangan pekerjaan di masa mendatang. Agar lapangan kerja khusus ini dapat sukses maka pendidikan kejuruan dimaksudkan untuk menyiapkan tenaga trampil yang dibutuhkan di masyarakat (Suharsimi Arikunto, 1988: 1). Lebih lanjut Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa ada tiga istilah sehubungan dengan pendidikan khusus, yaitu pendidikan teknologi (*technical education*), pendidikan kejuruan (*vocational education*), dan pendidikan karier (*career education*).

Rumusan pendidikan kejuruan bervariasi menurut subjektivitas yang merumuskan. Rupert Evans dalam Djojonegoro (1998: 33) mengemukakan bahwa pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang lebih mampu bekerja pada satu kelompok pekerjaan atau satu bidang

pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya. Definisi ini mengandung pengertian bahwa setiap bidang studi adalah pendidikan kejuruan, sepanjang bidang studi tersebut dipelajari lebih mendalam daripada bidang studi lainnya dan kedalaman itu dimaksudkan sebagai bekal memasuki dunia kerja. Dengan demikian bahasa Inggris yang dipelajari lebih mendalam daripada lainnya untuk tujuan bekerja, maka bahasa Inggris tersebut merupakan pendidikan kejuruan. Menurut Undang-Undang no. 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan: "Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu." Arti pendidikan kejuruan ini dijabarkan lebih spesifik dalam peraturan pemerintah no. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, yaitu: Pendidikan Menengah Kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk pelaksanaan jenis pekerjaan tertentu. Pada tingkat undang-undang, rumusan pendidikan kejuruan masih luas, namun setelah sampai pada peraturan pemerintah rumusan pendidikan kejuruan mulai dipersempit, yaitu hanya untuk jenjang pendidikan menengah.

Berkaitan dengan peran pendidikan kejuruan dalam pengembangan sumber daya manusia sebagaimana di atas, Djodjonegoro (1998) mengemukakan berbagai hasil kajian yang dilakukan pada tahun terakhir pelita V, dimana hasil kajian (penemuan) tersebut kurang sejalan dengan wawasan sumber daya manusia. Temuan itu antara lain. *Pertama*, dunia usaha dan dunia industri lebih cenderung mempekerjakan tamatan SMA daripada tamatan STM, SMEA, SMKK, atau tamatan Sekolah Menengah Kejuruan lainnya, dan gaji tamatan STM/SMEA/SMKK tidak berbeda dengan gaji tamatan SMA. *Kedua*, program Pendidikan Menengah Kejuruan yang disusun pada kurikulum 1994 lebih berorientasi pada pengejaran mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik, dan tidak jelas terfokus pada penguasaan

kompetensi atau kemampuan yang diperlukan di dunia kerja. *Ketiga*, program pendidikan (kurikulum) disusun oleh guru dan pakar pendidikan yang tidak mempunyai wawasan lapangan kerja, diajarkan oleh guru yang tidak mempunyai pengalaman kerja di dunia kerja, dan hasil pendidikannya pun dievaluasi oleh guru dengan menggunakan ukuran dunia pendidikan. *Keempat*, perilaku dan kebiasaan belajar mengajar di sekolah yang terkonsepsi sebagai dunia sekolah, berbeda jauh dengan perilaku, cara kerja dan kebiasaan yang ada di dunia industri. *Kelima*, perilaku sekolah cenderung melaksanakan program pendidikan demi pendidikan, dan kurang memahami pasar, wawasan mutu, dan wawasan keunggulan untuk menghadapi persaingan.

Berdasarkan kajian-kajian itulah, pada tahun 1994 atau tahun terakhir pelita V Depdikbud di bawah Wardiman sendiri sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan langkah-langkah pembaharuan pendidikan kejuruan dengan memperkenalkan kebijaksanaan *link and match*, yang mana bentuk kebijaksanaan ini dioperasionalkan dalam bentuk pelaksanaan program Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Program Pendidikan Sistem Ganda merupakan proses pendidikan kejuruan yang dilakukan di lembaga sekolah dan dilakukan di dunia industri langsung. Dengan demikian proses pendidikannya dilakukan berdasarkan kerja sama pihak sekolah dengan pihak industri. Kemudian secara lebih rinci, dimensi pembaharuan pendidikan kejuruan yang dilakukan meliputi: (1) Perubahan dari pendekatan *supply driven* ke *demand driven*; (2) perubahan dari pendidikan berbasis sekolah (*school base program*) ke sistem berbasis ganda (*dual based program*); (3) perubahan dari model pengajaran yang mengajarkan mata-mata pelajaran ke model pengajaran berbasis kompetensi; (4) perubahan dari program dasar yang sempit (*narrow based*) ke program dasar yang mendasar; kuat dan luas (*broad based*); (5) perubahan dari

sistem pendidikan formal yang kaku ke sistem yang luwes dan menganut prinsip *multy entry, multy exit*; (6) perubahan dari sistem yang tidak mengakui keahlian yang telah diperoleh sebelumnya ke sistem yang mengakui keahlian yang diperoleh dari mana dan dengan cara apapun kompetensi itu diperoleh; (7) perubahan dari pemisahan antara pendidikan dengan pelatihan kejuruan, ke sisitem baru yang mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan kejuruan secara terpadu; (8) perubahan dari sistem terminal ke sistem berkelanjutan; (9) perubahan dari manajemen terpusat ke pola manajemen mandiri; (10) perubahan dari ketergantungan sepenuhnya dari pembiayaan pemerintah pusat ke swadana dengan subsidi pemerintah pusat.

Dalam konteks proses pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan yang berbasis Pendidikan Sistem Ganda, pendidikan dan latihan dilakukan di sekolah dan di dunia industri. Sebagian besar program yaitu teori dan praktik kejuruan dilaksanakan di sekolah, dan sebagian lainnya dilaksanakan di dunia kerja (industri), yaitu keahlian produktif yang diperoleh melalui kegiatan bekerja di dunia kerja. Berdasarkan kurikulum 1999 (*curriculum base competency, curriculum base training, production base training*) persentasi antara pembelajaran praktik dan teori dalam mata diklat produktif adalah 60 : 40, kemudian siswa (tingkat tiga) diwajibkan melaksanakan praktik kerja industri selama 12 minggu dan sisanya yaitu 24 minggu berlangsung di sekolah, sementara untuk tingkat satu dan tingkat dua pembelajaran praktik pada mata diklat produktif berlangsung di *work shop* sekolah.

Berdasarkan hal di atas, sangat nyata bahwa peran bengkel/*work shop* sangat vital dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembelajaran siswa. Aspek yang sangat menentukan berkaitan dengan proses kegiatan pembelajaran praktik di *work shop* adalah manajemen *work shop* itu sendiri. Sejauhmana *work shop* dikelola dengan efektif sehingga dapat menunjang kegiatan pelaksanaan program pembelajaran

praktik yang harus dilakukan di *work shop*. Semakin efektif pengelolaan *work shop* yang dilakukan maka semakin maksimal tujuan pembelajaran dapat tercapai. Suharsimi (1988: 281) mengemukakan bahwa “nilai positif dari pengelolaan bengkel yang baik bukan hanya diperoleh oleh murid dan pengelolanya saja, tetapi dengan pengelolaan yang baik tersebut para guru akan dapat melaksanakan tugas mengajarnya dengan lebih baik.” Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan **Efektivitas Pengelolaan *Work Shop* di SMK Negeri 1 Cilegon-Banten Dalam Pelaksanaan Program Pembelajaran Mata Diklat Praktik Kejuruan**. Penelitian yang dimaksud dianggap penting karena akan diketahui kelemahan-kelemahan manajemen *work shop* di SMKN 1 Cilegon, dan sejauhmana tingkat efektivitas pengelolaannya. Temuan-temuan penelitian dijadikan bahan masukan sebagai rekomendasi guna penyempurnaan proses manajemen di masa mendatang.

Pertama-tama penelitian diorientasikan kepada pengungkapan gambaran tentang wujud pengelolaan *work shop* yang dilakukan di SMK Negeri 1 Cilegon. Kemudian fakta tentang pengelolaan *work shop* yang dilakukan tersebut dianalisis sehingga didapat suatu kesimpulan tentang tingkat efektivitas pengelolaan yang dilakukan. Fakta kesimpulan tentang tingkat efektivitas pengelolaan yang didapat dijadikan dasar untuk melakukan analisis terhadap pengelolaan *work shop* dengan menggunakan pendekatan SWOT untuk melihat faktor *kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman* yang berpotensi mempengaruhi terhadap pengembangan efektivitas pengelolaan yang diharapkan. Dari hasil analisis diharapkan dapat dikembangkan pola-pola alternatif guna penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan yang ada dan hal ini menjadi bahan masukan bagi pihak manajemen sekolah untuk langkah-langkah perbaikan pengelolaan selanjutnya.



B. Masalah Penelitian

Mengingat urgennya keberadaan dan pengelolaan *work shop* dalam menunjang pelaksanaan program pembelajaran praktik dan lebih jauh perannya dalam pencapaian tujuan pembelajaran di SMK, maka berdasarkan uraian di atas yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

"Bagaimana efektivitas pengelolaan *work shop* dalam pelaksanaan program pembelajaran mata diklat praktik kejuruan di SMK Negeri I Cilegon-Banten ?"

permasalahan pokok di atas dapat diperinci dengan rumusan masalah penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan *work shop* di SMK Negeri I Cilegon-Banten ?

Lebih lanjut pertanyaan ini diperinci sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses penyusunan program pengelolaan *work shop* ?
 - b. Bagaimana perencanaan tenaga pengelola *work shop* dan pengembangan kemampuannya ?
 - c. Bagaimana perencanaan Fasilitas, alat, bahan, dan biaya operasional *work shop* ?
 - d. Bagaimana perencanaan pengembangan *work shop* ?
2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan *work shop* di SMK Negeri I Cilegon-Banten?

Pertanyaan ini diperinci sebagai berikut:

- a. Bagaimana koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam proses pengelolaan *work shop*?
- b. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pengelolaan *work shop* dalam melayani kebutuhan kegiatan pembelajaran ?

- c. Bagaimana optimalisasi penggunaan fasilitas, alat dan bahan yang tersedia?
 - d. Bagaimana pengawasan penggunaan alat dan bahan ?
 - e. Bagaimana pemeliharaan dan pencatatan alat dan bahan ?
 - f. Bagaimana pelaksanaan fungsi *work shop* sebagai sumber belajar ?
 - g. Bagaimana pelaksanaan fungsi *work shop* sebagai sarana pendidikan ?
3. Bagaimana pengawasan terhadap pengelolaan *work shop* di SMK Negeri I Cilegon-Banten ?

Pertanyaan ini diperinci sebagai berikut:

- a. Siapa yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan *work shop*?
 - b. Bagaimana teknik pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan *work shop* ?
4. Bagaimana Analisis SWOT tentang pengelolaan *work shop* di SMK Negeri I Cilegon ?

Pertanyaan ini diperinci sebagai berikut:

- a. Faktor apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan *work shop* ?
 - b. Faktor apa saja yang menjadi peluang dan ancaman ?
5. Bagaimana output pengelolaan *work shop* di SMK Negeri I Cilegon ?

Pertanyaan ini diperinci sebagai berikut:

- a. Bagaimana output pengelolaan *work shop* dalam kinerja kegiatan belajar mengajar ?
- b. Bagaimana output pengelolaan *work shop* pada hasil belajar siswa ?

C. Tujuan Penelitian

- a. *Tujuan Umum*

- c. Bagaimana optimalisasi penggunaan fasilitas, alat dan bahan yang tersedia?
 - d. Bagaimana pengawasan penggunaan alat dan bahan ?
 - e. Bagaimana pemeliharaan dan pencatatan alat dan bahan ?
 - f. Bagaimana pelaksanaan fungsi *work shop* sebagai sumber belajar ?
 - g. Bagaimana pelaksanaan fungsi *work shop* sebagai sarana pendidikan ?
3. Bagaimana pengawasan terhadap pengelolaan *work shop* di SMK Negeri I Cilegon-Banten ?

Pertanyaan ini diperinci sebagai berikut:

- a. Siapa yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan *work shop*?
 - b. Bagaimana teknik pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan *work shop* ?
4. Bagaimana Analisis SWOT tentang pengelolaan *work shop* di SMK Negeri I Cilegon ?

Pertanyaan ini diperinci sebagai berikut:

- a. Faktor apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan *work shop* ?
 - b. Faktor apa saja yang menjadi peluang dan ancaman ?
5. Bagaimana output pengelolaan *work shop* di SMK Negeri I Cilegon ?

Pertanyaan ini diperinci sebagai berikut:

- a. Bagaimana output pengelolaan *work shop* dalam kinerja kegiatan belajar mengajar ?
- b. Bagaimana output pengelolaan *work shop* pada hasil belajar siswa ?

C. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum



Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menarik kesimpulan serta memprediksi implikasinya dan memberikan rekomendasi berdasarkan fenomena yang menjadi fokus permasalahan yang berkaitan dengan efektivitas manajemen *work shop* dalam pelaksanaan program pembelajaran mata diklat praktik kejuruan di SMK Negeri 1 Cilegon-Banten.

b. Tujuan Khusus

Bertitik tolak dari tujuan umum di atas, secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan tentang pengelolaan *work shop* yang mencakup aspek *perencanaannya*, meliputi: proses penyusunan rencana kegiatan *work shop*; perencanaan tenaga pengelola dan pengembangan kemampuannya; perencanaan tentang fasilitas, peralatan, bahan, dan biaya operasional; dan perencanaan tentang pengembangan *work shop*. Pada aspek *pelaksanaan kegiatannya*, mencakup: proses koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pengelolaan *work shop*; pelaksanaan kegiatan *work shop* dalam melayani kebutuhan kegiatan pembelajaran; optimalisasi penggunaan fasilitas, alat dan bahan yang telah tersedia; pengawasan penggunaan alat dan bahan; pemeliharaan dan pencatatan alat dan bahan; pelaksanaan fungsi *work shop* sebagai sumber belajar; dan pelaksanaan fungsi *work shop* sebagai sarana pendidikan. Kemudian pada aspek *pengawasannya*, meliputi: pelaksana pengawasan dan teknik pengawasan tersebut. Serta *output pengelolaan work shop* dalam aspek kinerja proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa.
2. Menganalisis tentang efektivitas pengelolaan *work shop*, yang meliputi aspek *perencanaannya*, mencakup: proses penyusunan rencana kegiatan *work shop*; perencanaan tenaga pengelola dan pengembangan kemampuannya; perencanaan

- tentang fasilitas, alat, bahan, dan dana operasional kegiatan *work shop*; dan perencanaan pengembangan *work shop*. Aspek *pelaksanaan kegiatannya*, mencakup: koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan *work shop*; pelaksanaan kegiatan *work shop* dalam melayani kebutuhan kegiatan pembelajaran; optimalisasi pemanfaatan fasilitas, alat dan bahan yang tersedia; pengawasan penggunaan alat dan bahan; pemeliharaan dan pencatatan alat dan bahan; pelaksanaan fungsi *work shop* sebagai sumber belajar; dan pelaksanaan fungsi *work shop* sebagai sarana pendidikan. Kemudian aspek *pengawasannya*, yang mencakup: pelaksana pengawasan dan teknik pengawasan yang dilakukan. Serta *output pengelolaannya* dalam aspek kinerja kegiatan belajar mengajar dan hasil belajar siswa.
3. Menarik kesimpulan dan memprediksi implikasi dari fakta kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam penelitian serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan menjadi bahan masukan bagi pihak manajemen sekolah dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan efektivitas pengelolaan *work shop* sehingga betul-betul berfungsi optimal dalam proses pencapaian tujuan pembelajaran mata diklat praktik kejuruan di SMK Negeri 1 Cilegon.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi peneliti pribadi dalam meningkatkan wawasan tentang penelitian sosial dan tentang pola-pola pengelolaan *work shop* yang efektif dalam pelaksanaan program pembelajaran mata pelajaran praktik kejuruan. Kemudian penelitian ini juga bermanfaat bagi para pengelola Sekolah Menengah Kejuruan khususnya dalam manajemen *work shop*, dan dapat pula

untuk memperkaya khasanah studi administrasi pendidikan khususnya yang berkaitan dengan Sekolah Menengah Kejuruan mengingat masih langkanya penelitian yang telah dilakukan yang mengambil kajian SMK khususnya di UPI. Di samping itu secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan *work shop* di Sekolah Menengah Kejuruan khususnya SMK Negeri 1 Cilegon-Banten guna bahan-bahan evaluasi dan pengambilan keputusan manajerial selanjutnya.

E. Paradigma Penelitian

Agar proses pembelajaran praktik berlangsung dengan efektif dan tujuan-tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik oleh para siswa sehingga siswa dapat memperoleh keterampilan yang diharapkan, maka perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dan motivasi siswa. Dalam hal ini faktor utama yang terkait adalah pola-pola pengelolaan *work shop* sebagai tempat pembelajaran praktik. Sejauh mana pengelolaan *work shop* telah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pembelajaran dan sejauhmana pula efektivitas pengelolaannya sehingga lebih jauh dapat memberikan suasana kegiatan belajar mengajar yang kondusif sehingga dapat memberikan motivasi yang tinggi bagi siswa terhadap pembelajaran praktik, kemudian berdasarkan motivasi yang tinggi dan pengelolaan *work shop* yang optimal, maka tujuan keterampilan yang diharapkan akan dapat dicapai oleh siswa secara optimal sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup administrasi sekolah mencakup: administrasi kesiswaan; kurikulum; personil (tenaga kependidikan); sarana-prasarana; keuangan; tatalaksana pendidikan; dan hubungan masyarakat. *Work shop* sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran praktik dalam wilayah garapan administrasi sekolah berada

pada bidang sarana-prasarana. Agar *work shop* berfungsi secara optimal dalam pencapaian tujuan pembelajaran, maka semua komponen yang terdapat di dalamnya harus dikelola dengan efektif.

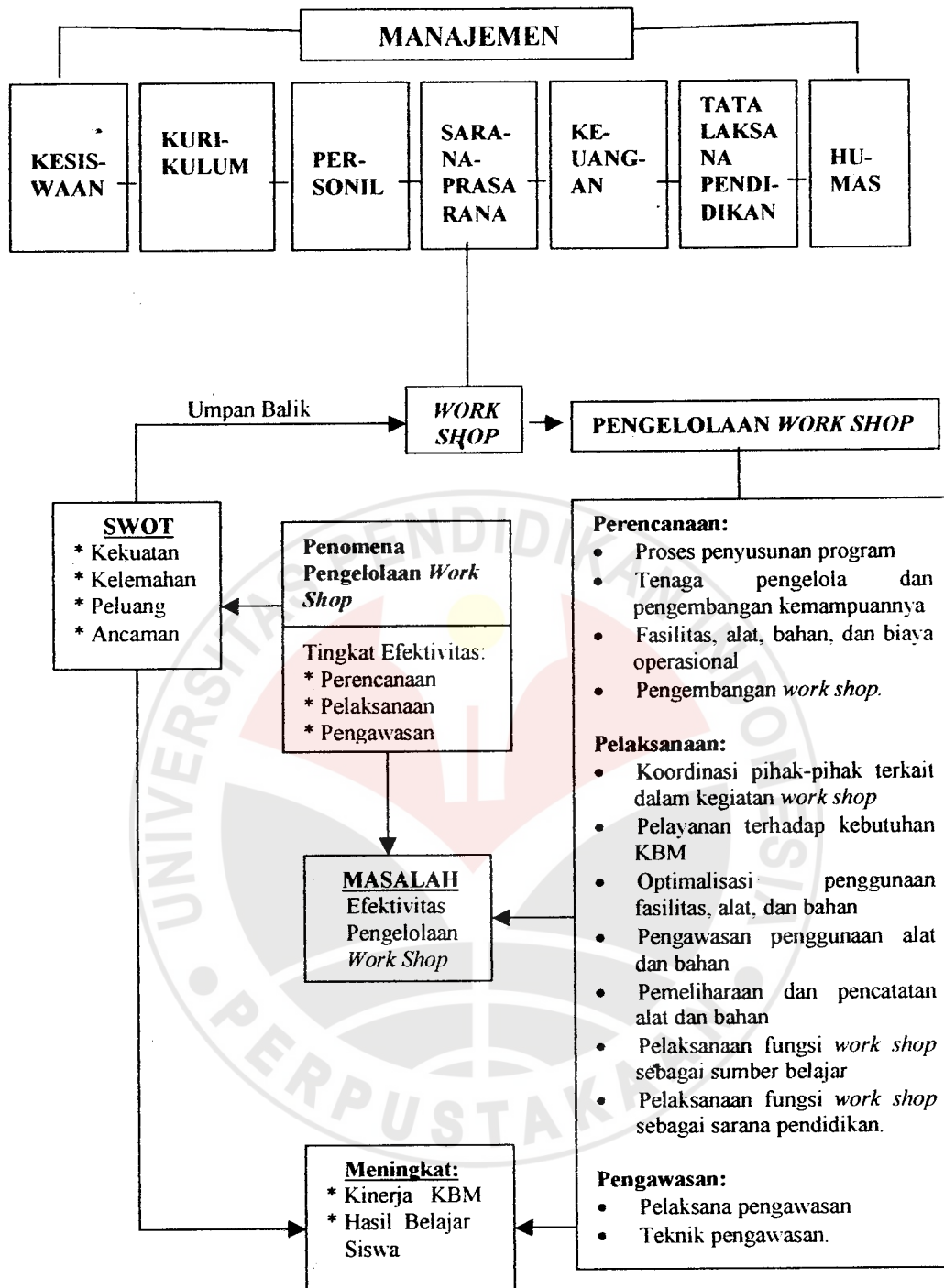
Kajian penelitian berangkat dari aspek manajemen *work shop* yang mencakup *perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan*. Pada tahap **perencanaan** dilihat proses penyusunan program pengelolaan *work shop*; perencanaan tenaga pengelola dan pengembangan kemampuannya; perencanaan fasilitas, alat, bahan, dan biaya operasional kegiatan *work shop*; serta perencanaan pengembangan *work shop*. Pada aspek **pelaksanaan** dilihat tentang proses koordinasi dengan pihak yang terkait dalam proses pengelolaan kegiatan *work shop*; pelaksanaan kegiatan pengelolaan *work shop* dalam melayani kebutuhan kegiatan pembelajaran; optimalisasi penggunaan fasilitas, alat dan bahan yang tersedia; pengawasan penggunaan alat dan bahan; pemeliharaan dan pencatatan alat dan bahan; pelaksanaan fungsi *work shop* sebagai sumber belajar; dan pelaksanaan fungsi *work shop* sebagai sarana pendidikan. Kemudian pada aspek **pengawasan** berkenaan dengan pelaksana dan teknik pengawasannya.

Ketiga aspek manajemen terkait yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tersebut dianalisis, sejauhmana efektivitasnya. Efektivitas pengelolaan dapat terlihat paling tidak dari adanya indikator: efisiensi, akuntabilitas, tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, situasi pembelajaran yang kondusif, motivasi siswa, dan tingkat kompetensi siswa. Dengan analisis yang dilakukan diharapkan akan diperoleh gambaran fenomena tingkat efektivitas pengelolaan *work shop* yang telah ada. Berdasarkan fenomena efektivitas pengelolaan yang ditemukan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan pola SWOT yang melihat faktor kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*)

pada pengelolaan *work shop* untuk mendapatkan pola-pola alternatif penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan yang ada. Hasil analisis yang dilakukan dapat menjadi umpan balik bagi kepala sekolah dan jajaran yang terkait dalam manajemen *work shop* yang berfungsi sebagai sumber belajar dan fungsi sarana pendidikan guna mencapai kualitas output yang diharapkan, berupa kinerja proses belajar mengajar yang kondusif dan tingkat keberhasilan belajar yang optimal.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat diilustrasikan dalam gambar paradigma penelitian pada halaman berikut:





Gambar 1: Paradigma Penelitian Efektivitas Pengelolaan *Work Shop* Pada Sekolah Menengah Kejuruan.

